



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahrul Mile bin Yahya Mile, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Irwani binti Imran, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl., pada tanggal 17 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2005, para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Imran dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Asis T. dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Irwanto dan Umar T. dengan mahar berupa uang senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada proses ijab dan kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kasman Rahman Mile, umur 13 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan ;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2005;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan maksud pokok permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi;

1. **Irwanto bin Imran**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi adalah adik kandung Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Sahrul Mile;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam tanggal 5 Maret 2005 di Desa Lameuru, dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten



Konawe, sekarang Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa status waktu para Pemohon menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Imran;
- Bahwa wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada Imam Desa bernama Asis T. untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu para Pemohon menikah adalah dua orang laki-laki bernama Irwanto dan Umar T;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada prosesi ijab kabul waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon II tidak dalam masa pinangan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon tidak pernah menikah dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

2. **Asnawing bin H. Supiah S.**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi adalah paman Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, di

Halaman 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Sahrul Mile;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam tanggal 5 Maret 2005 di Desa Lameuru, dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status waktu para Pemohon menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Imran;
- Bahwa wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada Imam Desa bernama Asis T. untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu para Pemohon menikah adalah dua orang laki-laki bernama Irwanto dan Umar T;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada prosesi ijab kabul waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon II tidak dalam masa pinangan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon tidak pernah menikah dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;

Halaman 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon

Halaman 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.



merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) atas perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 5 Maret 2005 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (satu) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 5 Maret 2005 di Desa Lameuru, dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe, sekarang

Halaman 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Pada waktu pernikahan para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan. Pada waktu para Pemohon menikah, yang menjadu wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Imran dan menyerahkan kepada Imam Desa bernama Asis T. untuk menikahkan para Pemohon; saksi-saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Irwanto dan Umar T; Ada proses ijab kabul dan mahar berupa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Sejak Para Pemohon menikah tetap beragama Islam dan tidak bercerai dan tidak pernah menikah dengan pihak lain serta telah dikaruniai satu orang anak. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling berkaitan dan saling menguatkan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 5 Maret 2005 di Desa Lameuru, dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II waktu menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Imran dan menyerahkan kepada Imam Desa bernama Asis T. untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi nikah ada dua laki-laki bernama Irwanto dan Umar T;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;

Halaman 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan waktu para Pemohon menikah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah menikah dengan pihak lain dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan

Halaman 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانكاح إِلبولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Imran, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Irwanto dan Umar T., maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.



وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu para Pemohon menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan serta para Pemohon tidak pernah cerai. Berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan para telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum. Oleh karena itu, pengajuan pengesahan nikah oleh para Pemohon beralasan dengan keadaan tersebut dan akibat hukum dari keadaan tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada para Pemohon karena merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2005 di Desa Lameuru, dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahrul Mile bin Yahya Mile**) dengan Pemohon II (**Irwani binti Imran**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2005 di Desa Lameuru, dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1441 Hijriah., oleh kami **Fahrudin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI. M.H.

Ketua Majelis

ttd

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahudin, S.HI., M.H.

Halaman 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA Adl.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)